

ANALISIS KOMUNIKASI KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA

Martinus Hary Wibowo

PhD Programe of Administration Science, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

martinushary@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini hendak membahas strategi komunikasi kebijakan maritim di Indonesia dengan fokus pada penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan. Komunikasi kebijakan maritim dianggap penting untuk memastikan pemahaman, dukungan, dan partisipasi aktif dalam implementasi kebijakan kelautan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi komunikasi kebijakan maritim, termasuk budaya, kepemimpinan, sumber daya manusia, struktur organisasi, integrasi lembaga pemerintah, dan dinamika global. Penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah dalam komunikasi kebijakan maritim, menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi. Kendala seperti kompleksitas isu maritim, keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman stakeholder, dan pengaruh media dan opini publik juga dibahas. Dalam menghadapi tantangan ini, peneliti tertarik untuk meneliti analisis komunikasi kebijakan Maritim: strategi keterlibatan pemangku kepentingan di Indonesia dimana peneliti berfokus pada penetapan tujuan komunikasi yang jelas, identifikasi stakeholder, pemilihan media yang tepat, dan manajemen pemahaman dan kepentingan yang beragam. Kesimpulannya, komunikasi kebijakan maritim yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas isu maritim, terbayatnya sumber daya, serta terdapat perbedaan pemahaman dan kepentingan stakeholder serta seringkali terjadi pemilihan media komunikasi yang tepat. Keterbatasan tersebut terus dilalukan perbaikan demi kebaikan dunia maritim di Indonesia.

Kata Kunci: *Komunikasi Kebijakan, Maritim, Pemangku Kepentingan, Negara, Pembangunan.*

ABSTRACT

This article aims to discuss maritime policy communication strategies in Indonesia with a focus on disseminating information to stakeholders. Maritime policy communication is considered important to ensure understanding, support and active participation in the implementation of maritime policy. Through a descriptive qualitative approach, this research identifies internal and external factors that influence maritime policy communication, including culture, leadership, human resources, organizational structure, integration of government institutions, and global dynamics. This research also highlights the role of government in maritime policy communication, emphasizing the importance of transparency, public participation, and the use of information technology. Obstacles such as the complexity of maritime issues, limited resources, differences in stakeholder understanding, and the influence of the media and public opinion are also discussed. In facing this challenge, researchers are interested in researching Maritime policy communication analysis: stakeholder engagement strategies in Indonesia where researchers focus on establishing clear communication objectives, identifying stakeholders, selecting appropriate media, and managing diverse understandings and interests. In conclusion, effective maritime policy communication is needed to maximize Indonesia's maritime potential and achieve sustainable maritime sector development goals. The research results show that there is complexity of maritime issues, limited resources, and there are differences in understanding and interests of stakeholders and often there is a choice of appropriate communication media. These limitations continue to be improved for the good of the maritime world in Indonesia.

Keywords: *Policy Communication, Maritime, Stakeholders, State, Development.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki bannyak pulau sehingga disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tentu saja memiliki potensi menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia sendiri memiliki tujuan agar Indonesia dapat menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur dengan mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki maritim yang kuat, aman serta terus menggali potensi maritim yang dimiliki untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Tentu saja, hal tersebut perlu di upayakan dengan sungguh-sungguh dan untuk menuju negara Poros Maritim Dunia perlu kiranya melakukan komunikasi antara berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan. Komunikasi kebijakan maritim sendiri merupakan suatu metode penyebaran informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi *stakeholders* dalam implementasi kebijakan maritim (Rizki, 2020). Hal ini penting untuk memastikan pemahaman dan dukungandi antara para pemangku kepentingan dan persepsi positif terhadap tata kelola kelautan. Komunikasi kebijakan maritim juga membantu masyarakat mempelajari dan menjadi lebih terlibat dalam pembangunan di sektor maritim. Untuk menerapkan strategi komunikasi kebijakan maritim, penting untuk menetapkan tujuan komunikasi yang jelas, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan, memilih mediakomunikasi yang tepat dan terus mengevaluasi dan meningkatkannya (Lanni, 2022).

Memahami cara mendefinisikan dan mengkomunikasikan kebijakan maritim dapat membantu pemerintah mengatasi permasalahan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk sektor maritim. Mengkomunikasikan kebijakan kelautan Indonesia memerlukan pencapaian beberapa tujuan penting. Pertama, tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang relevan di bidang maritim, sehingga mereka dapat menyadari pentingnya kebijakan tersebut dan berpartisipasi aktif dalam implementasinya. Selain itu, komunikasi kebijakan maritim juga bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Komunikasi kebijakan maritim bertujuan untuk memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan maritim. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan kelautan Indonesia. Melalui komunikasi yang

efektif, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan merasa dilibatkan dan memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan kelautan (Sumual, 2022).

Lebih lanjut, tujuan komunikasi kebijakan maritim Indonesia adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan transparan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengarah pada hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam implementasi kebijakan kelautan. Komunikasi kebijakan maritim membantu pemangku kepentingan memahami tujuan dan rencana kebijakan yang efektif memberikan informasi yang memadai kepada semua pihak dan mengurangi kesalahpahaman dan konflik (Samin et al., 2023). Komunikasi kebijakan maritim juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang berkaitan dengan sektor maritim. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami akan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam pembangunan sektor maritim melalui partisipasi dalam program pemerintah dan investasi (Lanni, 2022). Terlebih lagi, komunikasi mengenai kebijakan kelautan dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu Indonesia tampil sebagai negara yang serius dalam mengembangkan sektor maritim dan menjaga kelestarian lingkungan lautnya (Rosadi et al., 2022). Dalam situasi ini, komunikasi kebijakan kelautan juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Dengan komunikasi yang baik, Indonesia dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di sektor maritim. Hal ini akan berdampak pada perbaikan perekonomian (Rochwulaningsih et al., 2019).

Komunikasi kebijakan maritim dapat membantu pemangku kepentingan memahami tujuan dan rencana kebijakan. Kebijakan maritim yang efektif dapat memberikan informasi yang tepat kepada semua pihak terkait, mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Komunikasi kebijakan maritim juga dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam program-program yang berkaitan dengan sektor maritim. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembangunan sektor maritim, baik melalui partisipasi dalam program pemerintah maupun melalui investasi (Rochwulaningsih et al., 2019).

Selain itu, komunikasi kebijakan maritim dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat Indonesia terlihat sebagai negara yang serius dalam mengembangkan sektor maritim dan menjaga keberlanjutan lingkungan maritim. Dalam situasi seperti ini, komunikasi kebijakan maritim juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan sumber daya alam maritim yang potensial yang dimiliki Indonesia. Dengan komunikasi yang baik, Indonesia dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di sektor maritim. Ini akan menghasilkan peningkatan ekonomi (Arifin et al., 2021). Mengingat pentingnya komunikasi dalam kebijakan publik, tulisan ini hendak menganalisis faktor-faktor dan langkah strategis yang diperlukan dalam komunikasi kebijakan maritim untuk Indonesia. Dengan melihat pentingnya komunikasi maritim, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi maritim di Indonesia? Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi maritim di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Kebijakan Maritim

Komunikasi kebijakan maritim adalah cara untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan maritim. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan memahami dan mendapatkan dukungan, serta menciptakan persepsi positif tentang kebijakan maritim. Komunikasi kebijakan maritim juga membantumasyarakat belajar dan lebih terlibat dalam pembangunan sektor maritim (Ramdhani et al., 2022). Untuk menerapkan strategi komunikasi kebijakan maritim, penting untuk menetapkan tujuan komunikasi yang jelas, menemukan pemangku kepentingan yang relevan, memilih media komunikasi yang tepat, dan terus melakukan evaluasi dan peningkatan. Pemerintah dapat mengatasi masalah yang ada dan mencapai tujuan pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan dengan memahami definisi dan metode komunikasi kebijakan maritim (Ramdhani et al., 2022).

Ada beberapa tujuan utama yang harus dicapai untuk mengkomunikasikan kebijakan maritim Indonesia (Lanni, 2023). Pertama, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang relevan di bidang maritim

sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya. Selain itu, komunikasi kebijakan maritim juga bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan dampak kebijakan tersebut kepadamasyarakat luas dan *stakeholder*. Selain itu, komunikasi kebijakan maritim bertujuan untuk mendorong masyarakat dan *stakeholder* yang terkait untuk mendukungnya (Rizki, 2020). Untuk menjamin keberhasilan penerapan kebijakan maritim Indonesia, dukungan ini sangat penting. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dan *stakeholder* diharapkan dapat merasa terlibat dan memahami bagaimana mereka dapatberkontribusi untuk mewujudkan kebijakan maritim yang sukses. Selain itu, tujuan komunikasi kebijakan maritim Indonesia adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, yang menghasilkan hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan maritim.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yangberlandaskan kepada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2014).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti Jadi, jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur dengan memanfaatkan berbagai kajian-kajian yang serupa dan terkait dengan topik untuk memperoleh data penelitian (Purwanto, 2016).

D. TEMUAN

Faktor- faktor yang mempengaruhi Komunikasi Kebijakan Maritim

1. Faktor Internal

a. Faktor Budaya

Nilai, tradisi, kepercayaan dan norma yang menjadi landasan kehidupan sehari-hari suatu masyarakat disebut kebudayaan (Putri et al., 2022). Lebih jauh lagi, budaya mempengaruhi cara orang-orang dalam suatu masyarakat berperilaku, berpikir dan berinteraksi satu sama lain. Bahasa, agama, seni, arsitektur, musik, tari, pakaian dan adat istiadat semuanya merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan setiap masyarakat mempunyai kekhasan dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Kebudayaan tidak hanya berkembang dan berubah seiring waktu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh waktu, migrasi, globalisasi dan teknologi (Aminuddin et al., 2023). Faktor budaya tidak hanya mempengaruhi individu dan kelompok tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Identitas, nilai, norma dan aturan suatu masyarakat dibentuk oleh budayanya. Kebudayaan juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi (Jehadut, 2023). Selain itu, aspek budaya juga mempengaruhi politik dan ekonomi. Budaya dapat mempengaruhi daya tarik wisata, pertumbuhan ekonomi seperti industri kreatif dan kebijakan politik (Putri et al., 2022). Dalam masyarakat multikultural, budaya bahkan dapat menimbulkan konflik dan keberagaman. Memahami dan menghormati budaya yang berbeda dapat berkontribusi pada pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik, sekaligus memperkuat identitas dan kohesi sosial.

b. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mendorong orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dikenal sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan tim, mengatasi konflik dan membangun ikatan tim yang kuat (Rachman, 2022). Selain itu, manajemen juga penting dalam manajemen sumber daya organisasi. Manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer yang baik dapat mengelola aset perusahaan, menemukan dan mengatasi masalah, dan membuat

keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Untuk mencapai keberhasilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan saling mempengaruhi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan manajemen yang kuat, dan seorang manajer yang baik juga harus memiliki sifat kepemimpinan yang memotivasi dan menginspirasi timnya (Arfinasari, 2022). Singkatnya, keberhasilan organisasi bergantung pada komponen manajemen dan kepemimpinan. Berbeda dengan manajemen, kepemimpinan melibatkan pengaruh dan motivasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen dan kepemimpinan bekerja sama.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) mencakup semua orang yang bekerja untuk perusahaan, pekerjaan mereka, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mereka (Putri et al., 2022). Organisasi harus membuat keputusan yang tepat tentang perekrutan, pengembangan dan pemutusan hubungan kerja karena keberhasilan mereka bergantung pada kinerja sumber daya manusia. Ketika manajemen dan karyawan berkomunikasi dengan baik, mereka lebih termotivasi dan lebih terlibat. Baik produktivitas maupun kesejahteraan karyawan meningkat sebagai hasil dari lingkungan kerja yang menyenangkan. SDM sangat penting untuk menghadapi persaingan bisnis di seluruh dunia. Organisasi harus terus mengikuti tren dan kemajuan teknologi untuk memastikan pengetahuan dan ahli yang relevan. Sumber daya manusia berkontribusi pada keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan.

d. Faktor Struktur Organisasi

Pertama dan terpenting, ukuran organisasi dapat memainkan peran yang signifikan dalam menentukan struktur yang tepat. Organisasi yang lebih besar biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana dan fleksibel, sementara organisasi yang lebih kecil biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan hierarkis (Putri et al., 2022). Selain itu, lingkungan eksternal mempengaruhi struktur organisasi. Jika organisasi beroperasi di lingkungan yang berubah dengan cepat dan dinamis, struktur yang lebih fleksibel dan adaptif mungkin lebih cocok. Sebaliknya, jika organisasi beroperasi di lingkungan yang stabil dan stabil, struktur yang lebih kaku dan stabil mungkin lebih cocok. Struktur yang digunakan oleh organisasi juga dapat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Teknologi sederhana mungkin memungkinkan struktur organisasi yang lebih terdesentralisasi, tetapi teknologi yang kompleks dan canggih biasanya

membutuhkan struktur organisasi yang lebih terpusat. Terakhir, struktur didasarkan pada strategi organisasi. Struktur yang lebih terdesentralisasi mungkin diperlukan untuk pendekatan organisasi yang berpusat pada kontrol dan efisiensi, sementara pendekatan yang berpusat pada inovasi dan fleksibilitas mungkin memerlukan struktur yang lebih terkoordinasi dan terpusat (Putri et al., 2022). Untuk memilih struktur yang tepat untuk organisasi, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini secara menyeluruh. Ini akan memastikan bahwa struktur yang dipilih akan memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi.

e. Faktor Integrasi dan Sinergi Komunikatif antara Lembaga Pemerintah Kemampuan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dan menggabungkansumber daya dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama adalah salahsatu faktor integrasi (Mahayanti, 2023). Sebaliknya, lembaga pemerintah dapatsaling mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan baik melalui aliran informasi dan komunikasi yang lancar. Ini dikenal sebagai sinergikomunikatif. Lembaga pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan dengan sukses jika tidak ada faktor integrasi dan sinergi komunikatif yang kuat. Akibatnya, untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, lembaga pemerintah harus terus berusahameningkatkan faktor integrasi dan sinergi komunikatif mereka.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi komunikasi kebijakan maritim Indonesia yang kompleks dan melimpah adalah globalisasi yang terus berkembang dan dinamika politik dunia yang tidak menentu. Dalam era globalisasi yang semakin terbuka menuju dunia yang terhubung, komunikasi kebijakan maritim harus dapat menangani dan mengatasi berbagai tantangan dan tuntutan dari berbagai aktor global yang berperan penting dalam masalah maritim. Sementara itu, komunikasi kebijakan maritim Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik global. Indonesia harus mampu mengantisipasi dan menangani perubahan kebijakan luar negeri negara-negara besar atau pergeseran kepentingan geopolitik yang mungkin berdampak langsung pada strategi dan komunikasi kebijakan maritimnya karena tekanan dan perubahan yang terjadi di dunia politik (Parameswaran, 2020). Indonesia harus menyadari perubahan dan masalah baru dan proaktif dalam membuat rencana

komunikasi yang tepat untuk menangani keadaan yang terus berubah ini.

Untuk menghadapi faktor-faktor eksternal ini, pemerintah Indonesia harus memastikan strategi komunikasi kebijakan maritim tetap beroperasi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain untuk mendukung kepentingan maritim Indonesia (Prakoso, 2021). Untuk memaksimalkan potensi maritim Indonesia, pemerintah Indonesia harus berpartisipasi secara aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan kebijakan maritim, menjalin kerja sama yang kuat dengan negara-negara mitra, dan memperkuat diplomasi dan kemitraan (Samin et al., 2023). Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan maritimnya dan menjadi poros maritim dunia yang berdaulat dan berkeadilan.

3. Peran Pemerintah Indonesia dalam Komunikasi Kebijakan Maritim

Komunikasi kebijakan maritim adalah salah satu dari banyak aspek penting yang dilakukan pemerintah Indonesia (Rizki, 2020). Pertama, pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam pembuatan kebijakan maritim yang komprehensif dan progresif, dan tujuan-tujuan tersebut harus dikomunikasikan dengan tepat kepada masyarakat luas dan berbagai stakeholder terkait yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang kaya akan potensi maritim. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci tentang keuntungan dan manfaat spesifik yang akan diperoleh masyarakat dan sektor-sektor terkait dari wilayah tersebut. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam komunikasi kebijakan maritim, termasuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa ada forum diskusi dan diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menjaga transparansi dan mendapatkan masukan yang beragam dan relevan tentang bagaimana membuat kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi semua orang.

Kemudian pemerintah harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, yang mencakup semua jenis media komunikasi, seperti cetak, elektronik, dan digital, untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan maritim kepada masyarakat (Kristiyanti et al., 2023). Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah dapat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penerapan

kebijakan maritim, termasuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan (Yusrie et al., 2021). Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa informasi tentang kebijakan maritim disampaikan dengan jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Ini dapat dicapai melalui penyediaan publikasi yang mudah diakses dan mudah dipahami, seperti peta jalan kebijakan maritim dan akses terhadap data dan informasi yang relevan (Yuliarta et al., 2021). Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pendekatan edukatif yang efektif digunakan untuk menyampaikan tujuan dan pesan kebijakan maritim kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan menyadari betapa pentingnya untuk berpartisipasi dan mendukung secara aktif dalam mewujudkan visi maritim Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa komunikasi kebijakan maritim menjadi alat yang kuat untuk memahami, menumbuhkan harapan, dan mendorong kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui komunikasi yang transparan, terbuka, dan proaktif, diharapkan kebijakan maritim akan diterapkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Lanni, 2023).

E. BAHASAN

Strategi Komunikasi Kebijakan Maritim

Dalam melakukan komunikasi kebijakan dengan berbagai stakeholder, berikut merupakan strategi yang dilakukan:

1. Penentuan Tujuan Komunikasi Kebijakan Maritim

Sangat penting dalam strategi komunikasi dan advokasi kebijakan maritim untuk mengidentifikasi pihak berwenang. Para pemangku kepentingan ini dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut. Stakeholder dalam kebijakan maritim dapat mencakup pemerintah, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan pihak yang bergerak dalam industri kelautan (Lubis et al., 2023). Proses ini sangat penting untuk menentukan siapa yang akan berbicara, diberi prioritas, dan bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan maritim.

2. Identifikasi Stakeholder dalam Kebijakan Maritim

Identifikasi stakeholder merupakan tahap awal yang krusial dalam strategi komunikasi dan advokasi kebijakan maritim. Para stakeholder ini bisa berupa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan maritim, stakeholder dapat mencakup pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah dan pihak yang bergerak di industri kelautan (Lubis et al., 2023). Proses ini penting untuk mengetahui siapa yang akan berdialog, diprioritaskan, dan bekerja sama dalam implementasi kebijakan maritim.

3. Pemilihan Media Komunikasi yang Tepat

Salah satu langkah penting dalam strategi komunikasi kebijakan maritim adalah memilih media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Audiens target, pesan yang ingin disampaikan, dan tujuan komunikasi adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih media ini (Nyhan et al., 2019). Jenis media yang tepat mencakup cetak, elektronik, dan digital. Untuk memastikan bahwa pesan dapat diterima dengan mudah dan efektif oleh audiens yang dituju, sangat penting untuk mempertimbangkan jenis kebijakan yang ingin disampaikan

Tantangan dalam Komunikasi Kebijakan Maritim

1. Kompleksitas Isu Maritim

Salah satu masalah utama dalam komunikasi kebijakan maritim Indonesia adalah kompleksitas masalah maritim. Permasalahan maritim memiliki banyak aspek, seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan (Smidt, 2020). Akibatnya, pendekatan komunikasi yang efektif harus mampu mengatasi kesulitan ini dengan menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, strategi komunikasi harus menyadari betapa pentingnya masalah maritim bagi negara dan bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam pelaksanaan kebijakan maritim, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan ini, termasuk perusahaan swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Isu-isu maritim yang semakin kompleks dan dinamis memerlukan perubahan konstan dalam cara Indonesia berkomunikasi dan mendukung kebijakan maritim (Nurjannah et al., 2023).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan dalam komunikasi dan advokasi kebijakan maritim Indonesia adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan finansial, sumber daya manusia yang terbatas, dan infrastruktur yang belum memadai adalah beberapa dari keterbatasan tersebut. Sumber daya yang memadai diperlukan untuk kebijakan maritim agar informasi disebarkan dengan efektif kepada stakeholder terkait dan dilaksanakan dengan baik. Namun, keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara luas tentang kebijakan maritim dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan advokasi kebijakan maritim harus mencakup memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan bekerja sama dengan pihak lain di tingkat nasional dan internasional untuk mengatasi keterbatasan sumber daya (Atmodjo et al., 2020).

3. Perbedaan Pemahaman dan Kepentingan Stakeholder

Salah satu tantangan dalam komunikasi kebijakan maritim di Indonesia adalah pemahaman yang berbeda tentang kepentingan stakeholder (Safitri et al., 2022). Stakeholder dalam kebijakan maritim terdiri dari banyak pihak yang memiliki kepentingan dan pemahaman yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari kebijakan yang digunakan, yang dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kepentingan yang berbeda dari stakeholder juga dapat menghalangi mereka untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan tentang kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan pemahaman dan kepentingan stakeholder dan memastikan bahwa kebijakan maritim dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat, diperlukan pendekatan komunikasi yang efektif.

4. Pengaruh Media dan Opini Publik

Media massa dan opini publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan maritim Indonesia. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran publik tentang kebijakan maritim melalui pemberitaan yang beragam, pemikiran publik, dan analisis yang diberikan kepada masyarakat (Maryani, 2020). Opini publik juga sangat penting karena dapat berkontribusi pada penentuan dan penilaian kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan baik

bagaimana media berfungsi dan bagaimana opini publik dibentuk dalam konteks kebijakan maritim. Dalam menghadapi pengaruh yang begitu besar dari opini publik dan media massa saat ini, strategi komunikasi yang efektif harus dianggap serius. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan mendukung kebijakan maritim Indonesia memerlukan kemampuan untuk mengelola hubungan yang baik dengan media massa, kemampuan untuk membuat pesan yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan kemampuan untuk mendengarkan dan merespons pendapat publik (Lanni, 2023). Jika hal-hal ini dilaksanakan dengan baik dan direncanakan, komunikasi dan pendukung kebijakan maritim akan menjadi lebih kuat dan efektif dalam mencapai tujuannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan kebijakan maritim Indonesia. Hal ini melibatkan identifikasi pemangku kepentingan yang tepat, penetapan tujuan yang jelas, dan pemilihan media komunikasi yang tepat. Kompleksitas permasalahan maritim, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan harus dipertimbangkan. Indonesia dapat mengoptimalkan potensi maritimnya dan mengelola sektor ini melalui strategi komunikasi dan advokasi yang efektif. Untuk melaksanakan strategi ini, kerjasama antar lembaga pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, situs web, dan aplikasi telepon sangatlah penting. Melibatkan akademisi dan pakar maritim dalam diskusi dan pengambilan keputusan dapat memberikan wawasan yang akurat.

Komunikasi yang inklusif dan inklusif sangat penting untuk mengatasi perbedaan pemahaman dan kepentingan pemangku kepentingan. Konsultasi, diskusi, dan saluran komunikasi terbuka adalah kunci untuk mencapai konsensus dan dukungan luas terhadap kebijakan maritim. Pemerintah juga harus menyadari pentingnya menyediakan akses terbuka terhadap informasi dan menjawab pertanyaan publik untuk melindungi opini publik dan menjaga kredibilitas. Dengan kata lain bahwa komunikasi yang efektif sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan kebijakan maritim Indonesia. Selain itu, media massa dan opini publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan maritim Indonesia.

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran publik tentang kebijakan maritim melalui pemberitaan yang beragam, pemikiran publik, dan analisis yang diberikan kepada masyarakat. Opini publik juga sangat penting karena dapat berkontribusi pada penentuan dan penilaian kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media berfungsi dan bagaimana opini publik dibentuk dalam konteks kebijakan maritim. Strategikomunikasi yang efektif juga harus diterapkan untuk mendukung kebijakan maritim Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti budaya, kepemimpinan, manajemen, sumber daya manusia, dan struktur organisasi juga mempengaruhi komunikasi kebijakan maritim.

REFERENSI

- Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). *Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(4), 157-176.
- Arfinasari, H. D. (2022). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Keterlibatan Karyawan, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Startup Pt Perintis Teknologi Internasional Di Malang* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jawa Timur).
- Arifin, S., Zaini, A., & Wibawa, K. (2021). *Strengthening family-based local cultural values in the conflicting area and marine ecotourism of situbondo Indonesia*. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 14(2), 50-62.
- Atmodjo, E., Lamers, M., & Mol, A. P. (2020). *Governing dynamics in marineconservation tourism in Raja Ampat, Indonesia*. Tourism Planning & Development, 17(6), 655-673.
- Jehadut, V. T. (2023). *Sinergitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa Budaya Maritim (Studi Terhadap Pemerintah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Kristiyanti, M., Kundori, K., & Hermawati, R. (2023). *Membangun Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Sebagai Dasar Kejayaan Maritim DiIndonesia*. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 23(2), 109-122.
- Lanni, R. (2022). *Analisis Strategi Komunikasi Penyadaran Masyarakat terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI di Pulau Kodingareng Lompo= The Analysis of Public Awareness Communication Strategies on Environmental Improvement in the Coastal Areas by the Maritime Potential Development Service of the Sixth Main Naval Base in Kodingareng Lompo Island* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lanni, R. (2023). *Analisis Komunikasi Penyadaran Masyarakat terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI Di Pulau Kodingareng Lompo*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 1068-1079.

- Mahayanti, N. K. D. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abiansemal* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Maryani, T. (2020). *Pengaruh partisipasi pemakai sistem informasi, kemampuan pemakai sistem informasi, ukuran organisasi, program pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 36-46.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nyhan, B., & Reifler, J. (2019). *The roles of information deficits and identity threat in the prevalence of misperceptions*. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 29(2), 222-244.
- Parameswaran, P. (2020). *Assessing Indonesian Maritime Strategy*. asia policy, 15(3), 113-132.
- Prakoso, L. Y. (2021). *The total war strategy through the improvement of the role of national shipyard in supporting main weapon system of Indonesian navy*. Journal of Social and Political Sciences, 4(1).
- Purwanto, E. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putri, G. A. M., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). *Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi dan Struktur Organisasi*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3(3), 286-299.
- Rachman, V. H. (2022). *Geopolitics: Dynamics And Development of Indonesia's Maritime Axis*. Jurnal Ekonomi, 11(03), 1102-1108.
- Ramdhani, F. B., bin Masruhen, M. F., Ibrahim, M. Y., Pramitha, D., & Lubis, R. H. (2022). *The Opportunity of Sovereign Blue Sukuk Issuance in Maritime Sectors: Case Study of Indonesia*. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(02), 123-134.
- Rizki, K. (2020). *Pandangan Human Security Dalam Implementasi Dan Komunikasi Kebijakan Maritim Indonesia Dalam Menjaga Ekosistem Laut Studi Kasus: Penggunaan Pukat Harimau Di Laut Aceh*. JCommsci-Journal of Media and Communication Science, 3(2).
- Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., Masruroh, N. N., & Maulany, N. N. (2019). *Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economy*. Marine Policy, 108, 103602.
- Rosadi, A., Dargusch, P., & Taryono, T. (2022). *Understanding How Marine Protected Areas Influence Local Prosperity—A Case Study of Gili Matra, Indonesia*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 13508.
- Safitri, D. P., Hakim, A., Muluk, M. R. K., Putra, F., & Afriyanti, R. (2022, December). *Stakeholder Analysis of Coastal Management Policy in Indonesia*. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area, SHIMBA 2022, 18-20 September 2022, Tanjung Pinang, Kep. Riau Province, Indonesia: SHIMBA 2022* (p. 29). European Alliance for Innovation.
- Samin, R., & Zulkamirullah, M. (2023). *Strategi Kebijakan Pengembangan Konsep Sektor Kemaritiman di Indonesia*. Policy and Social Review, 3(1), 12-20
- Smidt, H. M. (2020). *United Nations peacekeeping locally: enabling conflict resolution, reducing communal violence*. Journal of Conflict Resolution, 64(2-3), 344-372.
- Sumual, A. C. (2022). *Strategi Komunikasi Dinas Penerangan Tni Angkatan Laut Pada*

- Zona Maritim Melalui Program Serbuan Vaksin Covid-19 Tahun 2021.* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). *Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia.* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 23(1), 180-189.
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2021). *Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan.* Jurnal Dirosah Islamiyah, 3(1), 126-143.